



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL  
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN  
PANGAN NON TUNAI DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN**

(Studi Kasus di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi  
Publik (S-1)

Oleh :

**AGUNG SRIHADI HIDAYAT**

NPM 217.01.09.1.164



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Agung Srihadi Hidayat, 2021, NPM 21701091164, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo). Dosen Pembimbing I : Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Dosen Pembimbing II : Dr. Hayat, S.AP., M.Si.

---

Sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang dikembangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan pengganti dari program Raskin/Rastra yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat atau yang disingkat dengan KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM. Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Desa yang sudah mengimplementasikan program pemerintah yang baru yaitu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Jumlah penerima BPNT murni di Desa Maron Wetan sebanyak 433 KPM yang telah diverifikasi dan layak menerima Bantuan Pangan Non Tunai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan analisis negatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan buku panduan program BPNT tahun 2018. Meskipun dalam penyalurannya ada beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya KPM BPNT murni. Akan tetapi Program Bantuan Pangan Non Tunai memberikan dampak dan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat khususnya KPM.

Berdasarkan dari hasil penelitian implementasi dari program BPNT sudah berjalan sesuai dengan aturan serta panduan yang ada, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang harus diperbaiki untuk kedepan oleh Pemerintah/penyalur agar implementasi dari program dapat terlaksanakan dengan baik dan maksimal serta sesuai dengan harapan.

**Kata kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat.**



## SUMMARY

Agung Srihadi Hidayat, 2021, NPM 21701091164, State Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of the Minister of Social Affairs Policy Number 20 of 2019 concerning the Distribution of Non-Cash Food Aid in Efforts to Improve the Welfare of the Poor (Case Study In Maron Wetan Village, Maron District, Probolinggo Regency ). Advisor I : Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Advisor II : Dr. Hayat, S.AP., M.Si.

---

As the Minister of Social Affairs Regulation Number 20 of 2019 concerning the Distribution of Non-Cash Social Assistance which was developed by the government to alleviate poverty. The Non-Cash Food Assistance Program is a substitute for the Raskin/Rastra program which aims to improve food security and provide balanced nutrition to Beneficiary Families or abbreviated as KPM, improve targeting accuracy and timeliness of receiving food aid for KPM. Maron Wetan Village, Maron District, Probolinggo Regency is one of the villages that has implemented a new government program, namely BPNT (Non-Cash Food Assistance). The number of pure BPNT recipients in Maron Wetan Village is 433 KPM which have been verified and are eligible to receive Non-Cash Food Assistance. The purpose of this study was to find out how to implement and describe how the implementation of the Non-Cash Food Aid distribution program in Maron Wetan Village, Maron District, Probolinggo Regency.

The research method used by the author is descriptive qualitative. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions. The validity of the data using extended observations, increased persistence, triangulation, and negative analysis.

The results of the study indicate that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Maron Wetan Village, Maron District, Probolinggo Regency is in accordance with the 2018 BPNT program guidebook. Although in its distribution there are several obstacles such as lack of socialization to the community, especially the pure BPNT KPM. However, the Non-Cash Food Assistance Program provides positive impacts and benefits for the welfare of the community, especially KPM.

Based on the results of the research, the implementation of the BPNT program has been running in accordance with the existing rules and guidelines,

although in its implementation there are still many obstacles that must be fixed in the future by the Government/distributor so that the implementation of the program can be carried out properly and optimally and in accordance with expectations.

**Keywords: Implementation, Non-Cash Food Aid, poverty, community welfare**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menyentuh secara langsung terhadap kelangsungan hidup manusia. Kemiskinan selalu diartikan sebagai kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara baik, misalkan kekurangan pangan, pakaian layak, dan lain sebagainya. Problematika kemiskinan di Negara kita tidak pernah tuntas, banyak sekali program-program dan kegiatan dari pemerintah dilaksanakan ternyata masih belum menjadi strategi ampuh untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Menurut Nurwati (2008) kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) presentase penduduk tidak mampu pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13

juta orang terhadap maret 2020 dan meningkat 2.76 juta orang terhadap September 2019.

Data ini membuktikan bahwa kegiatan ataupun tindakan yang telah dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam mengatasi kemiskinan belum memberikan hasil yang memuaskan. Realita ini menjelaskan bahwa segala program yang dilaksanakan untuk mengentaskan kemiskinan di Negara ini belum memberikan perubahan maksimal terhadap penurunan angka kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang meliputi 5 (lima) sasaran pokok yaitu : Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup, dan pengelolaan sumberdaya alam serta peningkatan infrastruktur.

Tujuan pembangunan kesejahteraan social adalah tercapainya kondisi kesejahteraan social yang adil dan merata serta berjalannya suatu system kesejahteraan social yang mapan sebagai salah satu bentuk kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian yang tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Ada beberapa kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melakukan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan telah menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan salah satunya dengan mengimplementasikan Permensos Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Dengan program tersebut yang didukung dengan program bantuan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan social, sesuai dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa “masyarakat miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” kemudian disebutkan dalam ayat (2) bahwa “Negara berkewajiban menangani masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan social”.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program yang dilaksanakan untuk menggantikan Pogram Bantuan Beras Sejahtera (rastra). Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang wujudkan dalam bentuk non tunai setiap bulannya melalui mekanisme elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang/e-warung yang bekerjasama dengan pihak bank.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah

bekerjasama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Yakni, usaha mikro kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warung KUBE PKH, Rumah Pangan Kita (RPK) dan lain sebagainya.

Pada Tahun 2021 Kabupaten Probolinggo menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 128.476 KPM dan Bantuan Sosial Tunai sebanyak 12.319 KPM dari Kementerian Sosial RI. Bantuan pangan non tunai disalurkan melalui mekanisme uang elektronik setiap bulannya sebesar Rp. 110.000,- yang digunakan untuk membeli beras, telur dan bahan pangan lainnya di e-warung yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Berdasarkan pengamatan penulis sementara, program ini masih belum berjalan maksimal karena masih banyak bantuan tidak tepat sasaran, namun dalam sejumlah indikator menunjukkan bahwa proses penyaluran BPNT saat ini mudah dan memberikan banyak pilihan dan kendali pada KPM sehingga memberikan dampak positif. Maka dari itu penulis tertarik untuk penelitian lebih lanjut terhadap **“Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”** sehingga mampu menanggulangi kemiskinan dan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat tidak mampu di Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

## 1.2 Rumusan Masalah

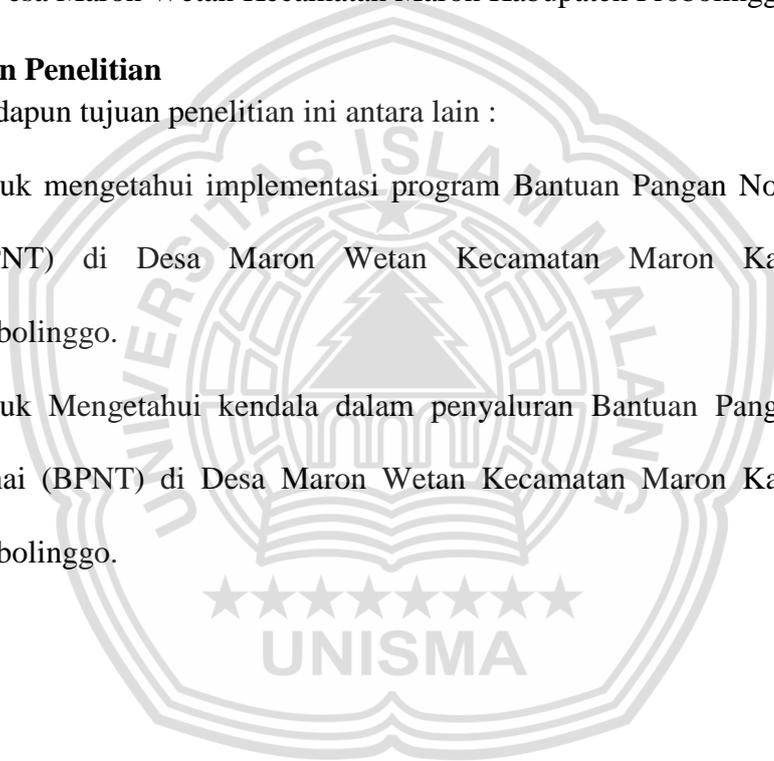
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?
2. Apa saja kendala dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk Mengetahui kendala dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Praktis

Karya tulis ini diharapkan bermanfaat bagi saya sendiri selaku peneliti dalam menulis suatu karya ilmiah ini, selanjutnya dengan ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang dibahas yakni Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, sekaligus menambah wawasan pembaca mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan BPNT.

##### 2. Manfaat Teoritis

- a. Harapannya karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam upaya implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di setiap wilayah di Indonesia khususnya, pemerintah Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam mengimplementasikan program pemerintah yaitu Bantuan Pangan Non Tunai.
- b. Sebagai media belajar untuk menambah , memperdalam wawasan, dan mengembangkan pengetahuan bagi peneliti sehingga dapat menunjang kemampuan individual dalam menyusun dan menganalisa masalah secara ilmiah. Serta memberikan sumbangan pemikiran tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian yang terdiri dari :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menyajikan review tentang hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul dan tema penelitian yang dilakukan.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi, waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta analisis data.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti, serta membahas hasil dari penelitian.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan yang peneliti paparkan di atas ada beberapa poin hasil temuan di dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Implementasi Program Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Maron Wetan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan buku pedoman BPNT (2019) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019.
1. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Maron Wetan berjalan dengan lancar, meskipun dalam penyaluran masih banyak terdapat kendala seperti banyaknya keluhan masyarakat tentang bahan pangan yang disalurkan yang tidak sesuai dengan keinginan KPM, banyak nya masyarakat yang terhasut dengan berita hoax.
2. Impelementasi program ini juga telah memberikan respon baik dari masyarakat dan memberikan dampak positif serta manfaat yang baik bagi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya KPM, memiliki dampak positif juga bagi UKM di desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, misal UKM Pembuatan Tempe.

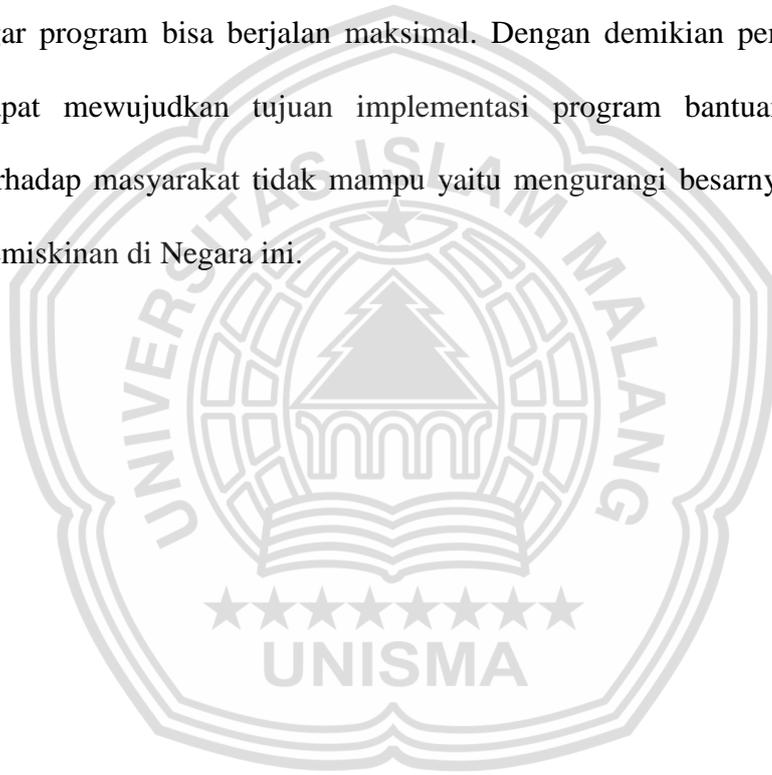
## 5.2 SARAN

1. Bagi pemerintah Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Selalu melakukan sosialisasi lebih tentang BPNT berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan khususnya kepada KPM BPNT murni, agar masyarakat lebih memahami serta tidak terjadi miskomunikasi antara masyarakat dan actor dalam penyaluran bantuan pangan ini. Memberikan sosialisasi/penyuluhan dan pemberdayaan serta pengetahuan kepada masyarakat tentang mengentas kemiskinan sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada bantuan sosial, serta perlu ditekankan terhadap bahayanya berita hoax dan tidak mudah untuk mempercayai berita atau isu-isu tidak benar yang tidak sesuai dengan kenyataan terhadap implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai. Program-program maupun kegiatan yang dilakukan Pemerintah diharapkan dilakukan secara merata. Agar tidak ada sebuah kecemburuan sosial antar masyarakat miskin satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan keselarasan para penerima bantuan menjadi tidak baik. Selain daripada itu agar tidak terjadi ketidak tepat sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maka para pelaksana kebijakan program penyaluran BPNT disarankan untuk melakukan pembaruan berkala terhadap verifikasi data penerima BPNT murni, agar tidak terjadi salah target dalam pembagian BPNT.

## 2. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan mampu untuk lebih sering terjun ke medan lapangan guna menganalisa sehingga dapat memahami bagaimana keadaan-keadaan dilapangan terkhususnya tentang segala bentuk kebijakan program bantuan yang diimplementasikan oleh pemerintah, selain menganalisa juga dapat memberikan saran terbaik agar program bisa berjalan maksimal. Dengan demikian pemerintah dapat mewujudkan tujuan implementasi program bantuan sosial terhadap masyarakat tidak mampu yaitu mengurangi besarnya angka kemiskinan di Negara ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, Saharuddin, dkk. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- FX Sri Sadewo, dkk. (2015). *Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*. Surabaya : UNESA University Press.
- Hayat, (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Hayat, (2018). *Kebijakan Publik*. Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur.
- Hayat,(2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Edisi pertama. Jakarta : Prenamada Group.
- Hayat, & Zunaida, D. (2018). *Kemandirian Desa*. Malang: Intelegensia Media.
- Nanga, Muana, dkk. (2018). *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta Pusat :Bappenas.
- Riyadi, dkk. (2015). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*. Jakarta : Badan Pusat Statistik (BPS)
- Suratman, Hayat, Umi . (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Edisi Pertama. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. (2003). *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sinamabela, dkk, (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta. Bumi Aksara Jakarta.

**JURNAL**

Ainiah, S. N., Afifuddin dan Hayat(2021). *Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (LANSIA) Di RW 1 Kelurahan Polowijen (Studi Kasus Pada Pelayanan Terpadu Lansia Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)*. Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1, No. 12 Mei 2021.(hal 61-68). Diakses 27 Juni 2021.

Hayat,S. H. Turohman dan Y. Cikusin (2018). *Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurnal Transformasi Administrasi Vol. 8, No 2 Tahun 2018. Diakses 1 Juli 2021.

Kulsum, U., N. U Ati dan Hayat (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi Kebijakan UU No.10 Tahun 2017 Tentang Pogram Keluarga Harapan pada Desa Tamansari 60 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)*. Jurnal Respon Publik Vol.13, No.6, Tahun 2019. (hal 70-76). Di akses pada 27 juni 2021.

Maulana, F., Sa'id, M. M., & Hayat. (2021). *Pengaruh Kineja Organisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada RT 02 dan RT 03 RW 04 Dusun Krajan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*. Jurnal Respon Publik Vol 15, No 4. 2021

Pratiwi, Rafika, *Analisis Program Raskindalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam*. Skripsi

Purba F, 2017. *Implementasi Program Beras Miskin Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari*, Skripsi

Putri, E. A., S. Muhsin dan Hayat (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)* Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 1, No. 12 Tahun 2021. Diakses 1 juli 2021

Siregar, Anggi Anggrayni (2019), *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warong Di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu*. Tesis.

Widowati, Nina. *Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Distribusi Beras miskin (RASKIN) Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol.1, Semarang, (UNDIP Oktober, 2015).h 5

#### SITUS RESMI

Badan Pusat Statistika, 2021. *Presentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10-19 Persen*. <https://www.bps.go.id/> diakses tanggal 13 Maret 2021.

Badan Pusat Statistika Kabupaten Probolinggo. <https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/23/58/1/perkembangan-kemiskinan-di-kabupaten-probolinggo.html>

Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo (2021) <https://probolinggokab.go.id/dinsos-sosialisasikan-bantuan-pangan-non-tunai/>. Diakses 24 juni 2021

Implementasi kebijakan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/implementasi-adalah/> diakses 26 Juni 2021

Kompasiana, 2015. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, <https://www.kompasiana.com/icai/54ff1feda333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan>, Di akses pada 5 Juni 2021

Kertya Witaradya (2010), *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*.  
<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>. Di akses pada 7 Juni 2021

Kemenkeu (2009), Kebijakan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2009, Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, diakses pada <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/13TAHUN2009PERPRES.htm>. diakses pada 7 Juni 2021.

Kemensos (2020), PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019.  
<https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/document/PERMENSOS%20NOMOR%2020%20TAHUN%202019.pdf>. Diakses pada 25 juni 2021

Kemensos (2019), Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai.  
<https://kemensos.go.id/uploads/topics/15767284433221.pdf>. diakses pada 25 juni 2021

Klasifikasi Kemiskinan, <https://pdfcoffee.com/indikator-pengukuran-tingkat-kemiskinan-ditinjau-dari-kemiskinan-absolut-pdf-free.html> . 25 Juni 2021

Penelitian menurut Nurwati mengenai kemiskinan  
<http://eprints.umpo.ac.id/4030/3/3.%20BAB%20II%20PDF.pdf>

Pengertian kemiskinan, <https://www.materibelajar.id/2016/04/teori-kemiskinan-pengertian-definisi.html>. diakses 26 Juni 2021

Perum BULOG, 2017, diakses pada <http://www.bulog.co.id/>. Di akses pada 7 juni 2021